

## PENGARUH PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI TAHUN 2021 – 2023

Natalogo Haposan<sup>1</sup>, Juaniva Sidharta<sup>2</sup>, Desideria Regina<sup>3</sup>

[natalogohaposan188@gmail.com](mailto:natalogohaposan188@gmail.com)<sup>1</sup>, [juaniva.sidharta@uki.ac.id](mailto:juaniva.sidharta@uki.ac.id)<sup>2</sup>, [desideria@uki.ac.id](mailto:desideria@uki.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 80 wajib pajak badan yang telah menjalani pemeriksaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax audits, tax collection, and taxpayer compliance on corporate income tax revenue at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati during the 2021–2023 period. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The sample consists of 80 corporate taxpayers that have undergone tax audits. The results indicate that tax audits, tax collection, and taxpayer compliance simultaneously have a positive and significant effect on corporate income tax revenue. These findings highlight the importance of improving the effectiveness of tax audits and collection, as well as strengthening taxpayer compliance, to optimize tax revenue.*

**Keywords:** Tax Audits, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Corporate Income Tax Revenue.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan dan berperan strategis dalam membiayai operasional pemerintah serta pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi komponen terbesar pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, maupun unsur kesengajaan, sehingga berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, sedangkan penagihan pajak bertujuan mendorong

pelunasan utang pajak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, tingkat kepatuhan wajib pajak badan selama periode 2021–2023 masih menjadi tantangan. Faktor seperti kompleksitas regulasi, beban administrasi, dan kondisi ekonomi diduga memengaruhi pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak badan. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penagihan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan edukasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada periode 2021–2023.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati pada periode 2021–2023?
2. Bagaimana pengaruh penagihan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati pada periode 2021–2023?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati pada periode 2021–2023?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemeriksaan dan penagihan pajak, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan lokasi utama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati, karena mayoritas wajib pajak badan yang menjadi objek penelitian terdaftar di kantor tersebut. Aktivitas penelitian berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025, dengan data yang dianalisis mencakup tahun pajak 2021–2023. Periode ini dipilih karena dianggap relevan untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pemeriksaan, penagihan pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan).

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh Badan. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif, serta pegawai KPP yang terlibat dalam proses pemeriksaan, berjumlah 80 orang. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling atau sampling jenuh (census), sehingga seluruh populasi dapat dijadikan responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berbasis indikator variabel penelitian dan diukur dengan skala Likert 1–5. Variabel independen meliputi pemeriksaan pajak (X1), penagihan pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah penerimaan PPh Badan (Y), dengan indikator yang dirancang untuk mengukur frekuensi, efektivitas, serta dampak setiap variabel secara objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Responden

pada penyajian data yang memiliki keterkaitan dengan responden, didapat informasi terkait karakteristik dari responded itu. Sampel responden yang diambil Adalah 80 karyawan staf pajak yang sudah pernah diperiksa oleh KPP di kantor KPP Pratama Jakarta Kramat jati. Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilakukan, bisa diidentifikasi karakteristik responden sebagai berikut.

#### a) Deskripsi Responden jabatan dalam Perusahaan

Deskripsi responden jabatan dalam Perusahaan bisa diperhatikan pada table 4.

Tabel 4.1

Jabatan	Jumlah	Persentase
Pemilik	0	0%
Manajer keuangan	0	0%
Staf pajak	80	100%
Lainnya	0	0

Sumber: kuesioner diolah 2025

Table 4.1 memperlihatkan bahwasanya deskripsi responden berdasarkan jabatan, terlihat bahwa responden dengan jabatan pemilik berjumlah 0 orang (0%), responden dengan jabatan manajer keuangan berjumlah 0 orang (0%), responden dengan jabatan staf pajak berjumlah 80 orang (100%) dan responden dengan jabatan lainnya 0 orang (0%) temuan ini memperlihatkan bahwasanya mayoritas responden dalam studi ini Adalah staf pajak.

#### b) Deskripsi responden jenis badan usaha

Deskripsi responden jenis badan usaha bisa diperhatikan pada table 4.2 di bawah.

Jenis badan usaha	Jumlah	Persentase
KPP Keramat jati	80	100%

Table 4.2 memperlihatkan deskripsi responded berdasarkan jenis badan usaha. Terlihat bahwa seluruh responden, yakni sejumlah 80 responden (100%), berasal dari kategori badan usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden dalam studi ini seluruh didominasi oleh badan usah

#### c) Deskripsi responden lama berdiri Perusahaan

Deskripsi responden lama berdiri Perusahaan bisa diperhatikan pada table 4.3 di bawah.

Lama berdiri Perusahaan	Jumlah	Persentase
< 3 Tahun	0	0%
3 -5 Tahun	0	0%
>5 Tahun	80	100%

Table 4.3 memperlihatkan bahwasanya deskripsi responden lama berdiri Perusahaan,

terlihat bahwa responden dari lama berdiri Perusahaan < 3 Tahun berjumlah 0 (0%), responden lama berdiri Perusahaan 3 – 5 Tahun berjumlah 0 (0%), dan responden lama berdiri Perusahaan > 5 Tahun berjumlah 80 (100%). Temuan ini memperlihatkan bahwasanya mayoritas responden lamanya berdiri Perusahaan > 5 Tahun.

**d) Deskripsi responden sudah pernah diperiksa oleh KPP**

Deskripsi responden sudah pernah diperiksa oleh KPP bisa diperhatikan pada table 4.4 di bawah ini.

Sudah pernah di periksa oleh KPP	Jumlah	Persentase
Ya	80	100%
Tidak	0	0%

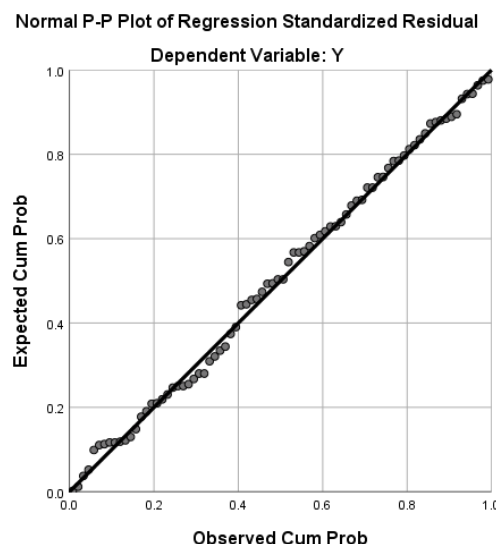
Tabel 4.4 memperlihatkan bahwasanya deskripsi responden sudah pernah diperiksa oleh KPP, terlihat bahwa Responden sudah pernah diperiksa oleh KPP 80 orang (100%), responden sudah pernah diperiksa oleh KPP yang tidak 0 orang (0%). Temuan ini memperlihatkan bahwasanya mayoritas responden sudah pernah diperiksa oleh KPP yaitu 80 orang yang sudah diperiksa.

**Temuan uji Asumsi Klasik**

**A. Temuan uji normalitas**

Normal tidaknya distribusi yang terjadi pada residual dalam model regresi bisa diuji dengan memanfaatkan uji normalitas. Asumsi normalitas dianggap bisa dipenuhi oleh suatu model saat nilai probabilitasnya melampaui 0,05. Pengujian ini menggunakan metode one-sample kolmogrov-semirnov melalui aplikasi SPSS. Temuan uji normalitas bisa diperhatikan pada table 4.5 dan grafik 2.2 yang dipaparkan sebagai berikut:

Gambar 2.2



Analisis data:

Grafik itu memperlihatkan bahwa garis diagonal diikuti oleh persebaran yang terjadi pada data sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa asumsi normalitas bisa dipenuhi oleh distribusi yang terjadi pada data

Table 4.5

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.62560453
Most Extreme Differences	Absolute	0.049
	Positive	0.049
	Negative	-0.044
Test Statistic		0.049
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

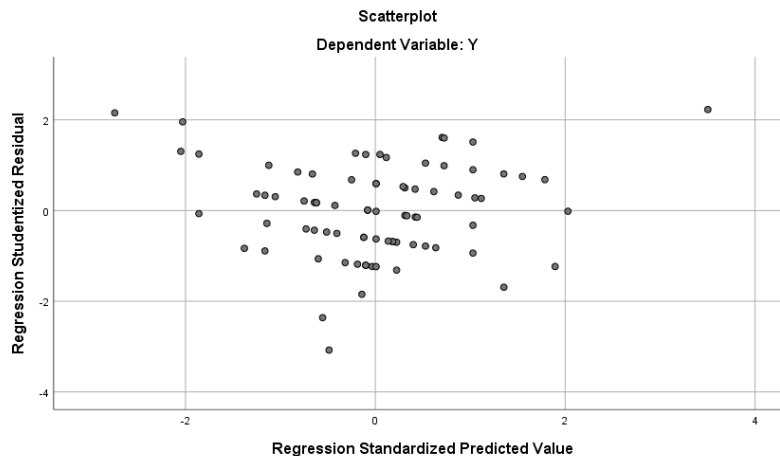
Pada uji normalitas data penelitian menggunakan uji *kolmogrov-smirnov* dengan menggunakan SPSS versi 26 dengan syarat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* melampaui 0.05, maka asumsi normalitas bisa dipenuhi oleh distribusi yang terjadi pada kelas. Di lain sisi jika nilai *Asymp sig (2-tailed)* di bawah 0.05 maka asumsi normalitas tidak bisa dipenuhi oleh distribusi yang terjadi pada kelas.

Berdasarkan data pada table itu didapat hasil perhitungan uji normalitas menggunakan uji *kolmogrov-smirnov* yaitu nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebanyak 0.200 sehingga bisa dikatakan bahwa nilai signifikan (2-tailed) melampaui 0.05.

**B. Temuan uji Heteroskedastisitas**

Ada tidaknya kesamaan yang dijumpai pada varians pada tiap-tiap Tingkat pengamatan dalam model regresi linier bisa diuji dengan memanfaatkan uji heteroskedastisitas. Tidak terlihat adanya kejadian heteroskedastisitas pada model saat nilai signifikansi melampaui 0,05. Hasil pengujian bisa diperhatikan pada bagian berikut:

Gambar 2.3



Analisis data:

Sebaran pola pada scatterplot memperlihatkan bahwa distribusi data tersebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, dan tidak ada pola yang jelas. sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terlihat adanya kejadian heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskesdisitas pada data sudah terpenuhi.

Table 4.6

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-2.834	7.185		-0.394
	Pemeriksaan pajak	0.045	0.066	0.075	0.690
	Penagihan pajak	0.097	0.124	0.086	0.779
	Keparuhan wajib pajak	0.107	0.112	0.107	0.956
					Sig.
					0.694
					0.492
					0.438
					0.342

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Kriteria pengujian:

Tidak terlihat adanya kejadian heteroskesdisutas pada data saat nilai signifikansi melampaui 0,05.

Analisis data:

1) Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variable pemeriksaan pajak ialah sebanyak 0,492 ( $>0,05$ ).

2) Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variable pemeriksaan pajak ialah sebanyak 0,492 ( $>0,05$ ).

3) Signifikansi sebanyak 0,342 ( $>0,05$ ).

Kesimpulan:

Nilai signifikansi yang dimiliki oleh Variable independent ialah melampaui 0,05, maknanya tidak terlihat adanya kejadian heteroskedastisitas.

### C. Temuan uji multikolineritas

Temuan uji multikolineritas yang bisa diperhatikan pada table berikut:

Table 4.7

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	36.905	13.192		2.798	0.007		
	Pemeriksaan pajak	0.257	0.121	0.238	2.120	0.037	0.958	1.043
	Penagihan pajak	0.097	0.124	0.086	0.779	0.438	0.998	1.002
	Kepatuhan wajib pajak	0.107	0.112	0.107	0.956	0.342	0.960	1.042

a. Dependent Variable: Y

Kriteria pengujian:

Tidak terlihat adanya kejadian multikolineritas saat nilai tolerance melampaui 0,100 dan VIF di bawah 10,00.

Analisis data:

Nilai tolerance yang dimiliki oleh variable indenpenden ialah melampaui ( $>0,100$ ) dan VIF di bawah ( $<10,00$ ), maknanya asumsi multikolineritas sudah terpenuhi atau tidak terlihat adanya kejadian multikolineritass.

### Temuan uji regresi berganda

Ada tidaknya dampak yang diterima variabel dependen dari dua variabel independen atau lebih bisa diuji dengan memanfaatkan analisis regresi berganda yang melibatkan skala pengukuran interval atau rasio dalam bentuk persamaan linear. Aplikasi SPSS versi 25 dimanfaatkan untuk mengimplementasikan analisis regresi berganda dalam studi ini.

Table 4.8

**Coefficients<sup>a</sup>**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	36.905	13.192		2.798	0.007
	X1	0.257	0.121	0.238	2.120	0.037
	X2	0.166	0.068	0.262	2.455	0.016
	X3	-0.151	0.061	-0.270	-2.482	0.015

a. Dependent Variable: Y

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 36.905 + 0.257X_1 + 0.166X_2 - 0.151X_3 + \varepsilon$$

Analisis persamaan regresi:

- 1) Nilai konstan sebanyak 36,905 memperlihatkan bahwasanya Saat variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak diasumsikan bernilai nol, maka penerimaan pajak penghasilan badan diprediksi berada pada angka 36,905
- 2) Koefisien regresi untuk variabel pemeriksaan pajak bernilai positif sebanyak 0,257 yang mengindikasikan bahwa tiap-tiap kenaikan pemeriksaan pajak sebanyak 1% akan berkontribusi pada kenaikan penerimaan PPh badan sebanyak 0,257.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel penagihan pajak juga memperlihatkan nilai positif sebanyak 0,166. Maknanya jika terjadi kenaikan penagihan pajak sebanyak 1% maka kenaikan akan dialami oleh penerimaan PPh badan sebanyak 0,166.
- 4) Koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak bernilai negative sebanyak -0,151 yang bermakna bahwa apabila kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 1% justru akan berdampak pada penurunan penerimaan PPh badan sebanyak 0,151.

**Uji Hipotesis**

Bagian ini menyajikan temuan dari analisis regresi berganda. Dengan merujuk pada temuan analisis itu, penelitian ini menjalankan pengujian hipotesis. Diterima tidaknya suatu hipotesis bisa ditetapkan dengan memperhatikan nilai signifikansi serta koefisien regresi. Ringkasan hasil pengujian hipotesis tersedia dalam table 4.9.



## A. Uji t

Table 4.9

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.905	13.192		2.798	0.007
	X1	0.257	0.121	0.238	2.120	0.037
	X2	0.166	0.068	0.262	2.455	0.016
	X3	-0.151	0.061	-0.270	-2.482	0.015

a. Dependent Variable: Y

### Kriteria pengujian:

Variabel dependen menerima pengaruh signifikan dari variabel independen saat nilai signifikasi di bawah 0,05.

### Analisis data:

- 1) Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel pemeriksaan pajak ialah sebanyak 0,037 (<0,05), maknanya variabel penerimaan pajak penghasilan badan menerima dampak signifikan dari variabel pemeriksaan pajak. (Dilakukan penerimaan pada H1).
- 2) Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel penagihan pajak ialah sebanyak 0,016 (<0,05), maknanya variabel penerimaan pajak penghasilan badan menerima dampak signifikan dari variabel penagihan pajak. (Dilakukan penerimaan pada H2).
- 3) Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel kepatuhan wajib pajak ialah sebanyak 0,015 (<0,05), maknanya variabel penerimaan pajak penghasilan badan menerima dampak signifikan dari variabel kepatuhan wajib pajak. (Dilakukan penerimaan pada H3).

## B. Uji F

Table 4.10

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.799	3	3.266	4.008	0.011 <sup>b</sup>
	Residual	61.938	76	0.815		
	Total	71.737	79			

### Kriteria pengujian:

Variabel dependen menerima pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan (berbarengan) saat nilai signifikansi di bawah 0,05.

Analisis data:

Variabel penerimaan pajak penghasilan badan menerima pengaruh signifikan dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan (berbarengan) saat nilai signifikasni sebanyak 0,11 ( $<0,05$ ).

### C. Uji R

Table 4.11

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.370 <sup>a</sup>	0.137	0.103	0.90276

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Analisis data:

Diketahui nilai adjusted R square sebanyak 0,103, maknanya variabel Y menerima pengaruh dari variabel X1, X2 dan X3 dan sisanya 89,7% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pemeriksaan Wajib Pajak Badan pada Penerimaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dengan nilai signifikansi 0,037 dan koefisien regresi 0,257. Hal ini berarti setiap peningkatan aktivitas pemeriksaan sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan PPh Badan sebesar 0,257 satuan. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendeteksi penghindaran atau penggelapan pajak dan melakukan koreksi atau penetapan tambahan pajak.

Secara teoritis, temuan ini mendukung konsep compliance, di mana efektivitas pemeriksaan menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Di Kecamatan Kramat Jati, peningkatan aktivitas pemeriksaan terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan, terutama pada perusahaan yang sebelumnya berpotensi tidak patuh. Hal ini menegaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi peningkatan penerimaan negara.

### Pengaruh Penagihan Wajib Pajak Badan pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penagihan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Badan, dengan nilai signifikansi 0,016 dan koefisien regresi 0,166. Penagihan pajak meliputi tindakan administratif maupun hukum seperti surat teguran, surat paksa, dan penyitaan aset, yang dilakukan ketika wajib pajak tidak melunasi kewajiban tepat waktu. Intensitas dan konsistensi penagihan menjadi faktor utama dalam memastikan tunggakan pajak dapat diselesaikan.

Hasil ini sesuai dengan teori deterrence, di mana adanya konsekuensi nyata mendorong kepatuhan wajib pajak. Di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, efektivitas administrasi penagihan terbukti mampu memulihkan penerimaan dari wajib pajak yang menunggak. Oleh karena itu, penagihan pajak tidak hanya penting sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengaman bagi penerimaan pajak, dan perlu terus ditingkatkan melalui sistem yang lebih efisien dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Analisis data menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan signifikan secara statistik terhadap penerimaan PPh Badan (signifikansi 0,015), namun koefisien regresinya negatif. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara tingkat kepatuhan dan nominal penerimaan pajak. Beberapa faktor yang menjelaskan hal ini antara lain penggunaan tax planning legal oleh wajib pajak yang patuh, koreksi laporan masa lalu yang dapat menurunkan pajak terutang, dan kepatuhan formal yang tidak selalu mencerminkan kepatuhan substansial.

Dengan kata lain, meskipun wajib pajak menunjukkan kepatuhan administrasi, hal tersebut tidak selalu meningkatkan penerimaan PPh Badan secara langsung. Temuan ini menegaskan pentingnya pengukuran kualitas kepatuhan, bukan hanya kuantitasnya, serta perlunya strategi pemerintah untuk mendorong kepatuhan yang tidak hanya formal tetapi juga substansial agar dapat secara efektif meningkatkan penerimaan pajak.

### **KESIMPULAN**

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dipengaruhi oleh pemeriksaan, penagihan, dan kepatuhan wajib pajak dengan cara yang berbeda. Pemeriksaan pajak terbukti meningkatkan penerimaan secara signifikan melalui efek pengawasan dan jera, sedangkan penagihan pajak efektif memulihkan tunggakan dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan negatif terhadap penerimaan, karena kepatuhan formal tidak selalu mencerminkan kepatuhan substansial, termasuk praktik tax planning legal. Sinergi antara pemeriksaan, penagihan, dan kepatuhan perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan keseimbangan antara penegakan hukum dan peningkatan kualitas kepatuhan.

DJP perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi pemeriksaan dengan berbasis risiko dan teknologi analisis data untuk mendeteksi ketidakpatuhan secara akurat. Sistem dan SDM penagihan harus dioptimalkan melalui pelatihan kompetensi dan penerapan sistem digital terintegrasi. Indikator kepatuhan pajak perlu dievaluasi agar mencerminkan kepatuhan substansial, tidak hanya administratif. Selain itu, edukasi pajak dan reformasi kebijakan insentif perlu diperluas untuk mendorong kepatuhan sukarela, meningkatkan kesadaran pajak, dan memastikan insentif benar-benar mendukung investasi dan penerimaan negara jangka panjang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni dan Irviani (2017, 13). (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://kbbi.web.id/preferensi.html>Diakses
- Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320. <https://doi.org/10.29210/020232643>
- Achmad Husaini Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,

- Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jejak 6, no. 2 (2015): 1–9
- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak.
- H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.2.
- Ika Yuliyanti, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
- Manurung, S. M., & Banjarnahor, H. (2020). PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM Mahasiswa Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam Dosen Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam ABSTRACT Tax is the biggest source of income in Indonesia in financing development . Effors.
- Nadhiastutie, A. (2010). Efektivitas penagihan pajak aktif terhadap optimalisasi penerimaan pajak. E-Journal.
- Ni Luh Supadmi, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 4, no. 2 (2009): 1–14.
- Primerdo, R. Y. (2015). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). 1–18. <http://eprints.ums.ac.id/36888/>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 8.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Silaban, J. M. P. (2010). Landasan Teori Faktor-Faktor Yang. 2007, 9–23.
- Su, A. (2018). Bab II Landasan Teori. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 8–24.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. Risalah Hukum, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>.
- Sulastyawati, “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.”
- Setiadi Alim Lim, “UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA,” Jurnal Bisnis 9 (2017): 28–47.
- Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco.1991
- Tarigan, P. B. (2017). Bab Ii Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan 25. Jurnal Perpajakan, 53(9), 1689–1699.
- W. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmiah Binaniaga, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>